

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan

1. Manajemen Kas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dinilai berdasarkan:

a. Perencanaan Kas (*Forecasting*)

Perencanaan Kas adalah perencanaan atau estimasi terhadap posisi kas pada suatu saat tertentu dalam suatu periode tertentu yang akan datang (Indriyo Gitosudarmo, 2002 : 65). Untuk mendukung kegiatan Perencanaan Kas yang merupakan bagian dari pelaksanaan *Treasury Single Account*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2007, yang mewajibkan KPPN melakukan permintaan kebutuhan dana berdasarkan perencanaan keuangan setiap harinya. Selain itu, untuk mempermudah dan mendukung kegiatan Perencanaan Kas, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberlakukan sistem aplikasi SPAN pada tahun 2010 yang merupakan sistem berbasis intranet yang terhubung dengan kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk digunakan di setiap KPPN. Pelaksanaan Perencanaan Kas di KPPN Yogyakarta dimulai pada Oktober 2007 bersamaan dengan pelaksanaan *Treasury Single Account*. Antara Seksi Bank dengan Seksi Pencairan Dana selalu

dilakukan koordinasi dan pelaksanaannya diawasi oleh Kepala KPPN Yogyakarta.

Pada Tabel 4.1 akan diketahui persentase ketepatan Perencanaan Kas dan persentase ketepatan penyediaan dana pada rekening kas negara untuk membiayai pengeluaran negara yang dilakukan oleh KPPN Yogyakarta dengan menggunakan data yang berasal dari Laporan Pagu dan Realisasi Belanja Per Bagian Anggaran Periode Januari 2016 sampai dengan Oktober 2016 yang terdapat di Seksi Bank.

Persentase ketepatan Perencanaan Kas dan persentase ketepatan penyediaan dana menjadi kegiatan yang sangat mutlak dibutuhkan dan saling memengaruhi. Dengan menggunakan data Laporan Pagu dan Realisasi Belanja Per Bagian Anggaran kita akan mengetahui keadaan Manajemen Kas pada KPPN Yogyakarta.

1) Persentase ketepatan Perencanaan Kas

Pada tabel 4.1 memperlihatkan ketepatan Perencanaan Kas Per Bagian Anggaran (BA) periode bulan Januari 2016 sampai dengan Oktober 2016. Hampir semua per Bagian Anggaran mempunyai Persentase melebihi 100% atau pagu lebih besar dari realisasi, kecuali pada Satker dengan Kode BA 060 yang mempunyai persentase ketepatan 95,90% dikarenakan adanya kebijakan penghematan anggaran oleh Kementerian Keuangan,. Jadi, kegiatan Satker yang tidak mendesak, dapat dilaksanakan tahun depan untuk menghemat anggaran sesuai dengan instruksi Kementerian Keuangan.

Tabel 4.1
Perencanaan Kas (*Forecasting*) dan ketepatan penyediaan dana pada Laporan
Pagu dan Realisasi Belanja Per Bagian Anggaran
Periode Januari s/d Oktober 2016

No.	KODE BA	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Akurasi (%)
	1	3	4	$5 = (4 \div 3) \times 100$
1	004	4.996.239.000	4.314.399.331	115,80
2	015	51.192.630.000	41.549.955.588	123,21
3	023	84.308.637.000	68.073.233.422	123,85
4	024	178.768.447.000	141.897.828.651	125,98
5	025	518.681.581.000	385.569.478.692	134,52
6	042	911.343.205.000	721.262.070.617	126,35
7	054	18.270.285.000	17.475.815.391	104,55
8	060	484.498.245.000	505.211.743.434	95,90
9	063	8.404.411.000	6.601.332.513	127,31
10	080	45.718.389.000	36.983.914.655	123,62

Sumber: Data Sekunder diolah sendiri

Pada saat sebelum terjadi pemotongan anggaran oleh pemerintah, Satker dengan Kode BA 060 sudah melaksanakan atau menjalankan program kerja dan sudah dibayarkan. sehingga Pagu menjadi lebih kecil dari realisasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Permintaan dana untuk pembayaran gaji lebih besar dari PAGU, sehingga jika terjadi kesalahan atau perencanaan,

akan memengaruhi persentase akurasi *Forecasting* yang dilakukan KPPN Yogyakarta.

2) Persentase ketepatan penyediaan dana

Tabel 4.1 memperlihatkan ketepatan penyediaan dana berdasarkan realisasi penarikan dana yang disediakan. Realisasi penarikan dana berasal dari total jumlah uang SP2D yang diterbitkan KPPN Yogyakarta. Berdasarkan SP2D tersebut, Bank Operasional melakukan penarikan dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (RPK-BUN-P) merupakan hasil Perencanaan Kas yang dilakukan di Seksi Bank. Ketepatan penyediaan dana tergantung dengan Perencanaan Kas yang dilakukan, jika terjadi kesalahan pada Perencanaan Kas maka persentase ketepatannya akan menunjukkan hasil yang tidak sempurna karena berbeda realisasinya.

Pada per Bagian Anggaran periode bulan Januari 2016 sampai dengan Oktober 2016 hampir per Bagian Anggaran menunjukkan angka melebihi 100%, kecuali pada BA 60 sebesar 95,90%. Hal ini sebagai akibat dari kesalahan Perencanaan Kas, di mana dana yang disediakan pada RPK-BUN-P sesuai dengan permintaan atau Perencanaan Kas tetapi dana yang disediakan tersebut tidak sesuai dengan realisasinya. Karena ada perbedaan (penyedia dana) dan realisasi sehingga Satker dengan kode BA 60 membuat berita acara dan menyusun revisi Pagu beserta SP2D.

Dana yang disediakan pada RPK-BUN-P selalu bergantung terhadap Perencanaan Kas yang dilakukan. Sehingga jumlah Perencanaan Kas mempengaruhi ketepatan penyediaan dana. Dari analisis di atas, dapat diketahui bahwa Manajemen Kas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta baik karena menunjukkan tingkat akurasi yang hampir 100%.

b. Remunerasi

Remunerasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (dalam Setianingias, 2011 : 55) adalah pemberian hadiah (penghargaan atas jasa dsb.) atau imbalan. Remunerasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *remuneration*. Secara harafiah Remunerasi adalah *payment* atau penggajian, bisa juga uang ataupun substitusi dari uang yang ditetapkan dengan peraturan tertentu sebagai timbal balik suatu pekerjaan dan bersifat rutin. Pada Undang-Undang Perbendaharaan Nomor 1 tahun 2004 pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah Pusat memperoleh bunga dan atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Sentral. Berdasarkan amanat tersebut, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia menandatangani keputusan bersama tentang Koordinasi Pengelolaan uang Negara Nomor 11/KEP.GBI/2009 tanggal 30 Januari 2009. Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2009 sebagai *win-win solution*, salah satu kesepakatan yang tertuang dalam keputusan bersama tersebut adalah Bank Indonesia akan memberikan Remunerasi dengan tingkat bunga 65% dari *BI Rate* atas penempatan pemerintah pada Bank Indonesia.

Tabel 4.2
Perhitungan potensi penerimaan negara Januari 2016 – Oktober 2016

No.	Bulan	Tarif	Rate	Saldo Kas (Rupiah)	Remunerasi (Rupiah)
	1	2	3	4	5 = (2×3)×4
1	Januari 2016	65%	7,25%	35.456.080.521	1.670.867.795
2	Februari 2016	65%	7,00%	34.917.881.941	1.588.763.628
3	Maret 2016	65%	6,75%	34.966.745.636	1.534.165.965
4	April 2016	65%	6,75%	37.165.560.846	1.630.638.982
5	Mei 2016	65%	6,75%	34.295.588.389	1.504.718.941
6	Juni 2016	65%	6,50%	34.213.623.404	1.445.525.589
7	Juli 2016	65%	6,50%	34.032.463.900	1.437.871.600
8	Agustus 2016	65%	5,25%	34.102.336.725	1.163.742.241
9	September 2016	65%	5,00%	33.883.695.720	1.101.220.111
10	Oktober 2016	65%	4,75%	33.759.353.207	1.042.320.030
Total				346.793.330.289	14.119.834.881

Sumber: Data sekunder diolah sendiri

Pada tanggal 19 Agustus 2016 di berlakukan BI *7-day (Reverse) Repo Rate* menggantikan BI *Rate*. Perkenalan suku bunga yang baru ini tidak mengubah *stance* kebijakan moneter yang sedang diterapkan. Berdasarkan keputusan bersama tersebut untuk menghitung besarnya potensi penerimaan atas Remunerasi saldo kas pemerintah akan digunakan data yang berasal dari Bank Indonesia mengenai BI *Rate* mulai bulan Januari 2016 sampai dengan Oktober 2016 (www.bi.go.id) serta tarik 65%.

Data saldo kas akhir bulan Januari 2016 sampai dengan Oktober 2016 maka diperoleh perhitungan seperti tabel 4.2.

Dapat diketahui dari tabel 4.2 penerimaan kas selama bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 sebesar Rp14.119.834.881,00. Dari analisis tersebut, dapat diketahui bahwa Manajemen Kas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta dinilai baik, karena penempatan dana pada bank sentral memberikan tambahan penerimaan bagi pemerintah. Dengan kata lain, pengelolaan uang negara yang optimal akan memberikan manfaat bagi pemerintah.

2. *Treasury Single Account* Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dinilai dari *Idle Cash*.

Idle Cash adalah uang yang mengendap atau menganggur pada bank yang berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran atau penerimaan. Pada saat ini dengan menggunakan data historis saldo kas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2007 dapat dianalisis jumlah *Idle Cash*. Sebelum pelaksanaan *Treasury Single Account* hingga September 2007 digunakan asumsi kas minimal yang ada di Bank Operasional sebesar Rp10.000.000.000,00 setiap harinya. Pada pelaksanaan *Treasury Single Account*, saldo kas minimal adalah nihil (nol). Khusus untuk akhir hari Jumat tanggal 28 September 2007 dilakukan penihilan saldo kas akhir karena tanggal 1 Oktober 2007 *Treasury Single Account* efektif dilaksanakan di KPPN Yogyakarta. Dengan penerapan *Treasury Single Account*, seluruh saldo kas

disetorkan ke RKUN yang ada pada Bank Sentral (Bank Indonesia) karena pada akhir hari kerja tidak boleh ada uang atau saldo yang mengendap di Bank Operasional dan Bank Persepsi.

Pada tabel 4.3 dengan perhitungan mencari jumlah *Idle Cash* yang diperoleh dengan mengurangi saldo akhir dengan saldo kas minimal dapat diketahui besarnya *Idle Cash* yang merupakan penerapan dari *Treasury Single Account*. Saldo kas akhir bulan Januari menjadi saldo awal bulan Februari, begitu seterusnya. Sedangkan sebelum pelaksanaan *Treasury Single Account*, saldo kas minimal sebesar Rp10.000.000.000,00 disediakan di akhir bulan untuk mengisi saldo kas minimal awal bulan berikutnya.

Hasil perhitungan Tabel 4.3 menunjukkan pada bulan Januari 2007 sampai dengan September 2007 *Idle Cash* tiap bulan mempunyai jumlah yang tidak sedikit. Pada kenyataannya, saldo kas minimal juga menjadi faktor penambah besarnya *Idle Cash*, karena setiap hari tersedia dana sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk mengisi likuiditas Bank Operasional.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui total *Idle Cash* selama bulan Januari sampai dengan September sebesar Rp822.567.430.804,00. Perhitungan pada kolom 5 di tabel 4.3 sebenarnya menunjukkan akumulasi dari *Idle Cash* yang tiap bulan terjadi di Bank Operasional. Perubahan terjadi ketika *Treasury Single Account* mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2007, di mana di akhir bulan September dan bulan-bulan berikutnya tidak disediakan lagi saldo kas minimal sebesar Rp10.000.000.000,00.

Tabel 4.3
Idle Cash tahun 2007

No.	Bulan	Saldo Kas Akhir (Rp)	Saldo Kas Minimal (Rp)	Saldo Sisa (Rp)	<i>Idle Cash</i> (Rp)
	1	2	3	4 = 2-3	5
1	Januari	90.481.065.241	10.000.000.000	80.481.065.241	80.481.065.241
2	Februari	104.517.911.010	10.000.000.000	94.517.911.010	94.517.911.010
3	Maret	91.856.073.304	10.000.000.000	81.856.073.304	81.856.073.304
4	April	108.319.854.789	10.000.000.000	98.319.854.789	98.319.854.789
5	Mei	103.039.534.786	10.000.000.000	93.039.534.786	93.039.534.786
6	Juni	101.380.849.013	10.000.000.000	91.380.849.013	91.380.849.013
7	Juli	101.920.271.355	10.000.000.000	91.920.271.355	91.920.271.355
8	Agustus	98.305.040.643	10.000.000.000	88.305.040.643	88.305.040.643
9	September	102.746.830.663	0	102.746.830.663	102.746.830.663
10	Oktober	94.700.750.435	0*)	94.700.750.435	0
11	November	87.037.365.431	0*)	87.037.365.431	0
12	Desember	108.394.109.091	0*)	108.394.109.091	0
Total		1.192.699.655.761			822.567.430.804

Sumber: Data Sekunder diolah sendiri

Keterangan: *) mulai diterapkan TSA

Tabel 4.4
Idle Cash Tahun 2016

No.	Bulan	Saldo Kas Akhir (Rupiah)	Saldo Kas Minimal (Rupiah)	Saldo Sisa (Rupiah)	<i>Idle Cash</i> (Rupiah)
	1	2	3	4 = 2-3	5
1	Januari	35.456.080.521	0	0	0
2	Februari	34.917.881.941	0	0	0
3	Maret	34.966.745.636	0	0	0
4	April	37.165.560.846	0	0	0
5	Mei	34.295.588.389	0	0	0
6	Juni	34.213.623.404	0	0	0
7	Juli	34.032.463.900	0	0	0
8	Agustus	34.102.336.725	0	0	0
9	September	33.883.695.720	0	0	0
10	Oktober	33.759.353.207	0	0	0
Total		346.793.330.289			0

Sumber: Data sekunder diolah sendiri

Setelah bulan September 2007 sudah sepenuhnya dilaksanakan *Treasury Single Account*, saldo kas minimal adalah nihil dan tidak ada lagi *Idle Cash* yang terjadi setiap bulannya karena dilakukan pelimpahan dana dari Bank Operasional ke bank Sentral sehingga *Idle Cash* yang terjadi setelah penerapan *Treasury Single Account* adalah nihil seperti pada tabel 4.4. Uang yang masuk dan keluar tiap harinya hanya melalui satu rekening yaitu Rekening Kas Umum Negara. Dana yang keluar untuk membiayai pengeluaran berdasarkan

Perencanaan Kas untuk pengeluaran, jika menimbulkan saldo lebih yaitu pengeluaran lebih sedikit daripada Perencanaan Kas, maka akan disetorkan pada Rekening Kas Umum Negara pada hari itu juga.

Dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa penerapan *Treasury Single Account* pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta menghilangkan *Idle Cash* yang terjadi sebelum diterapkannya *Treasury Single Account*. Dapat diketahui tujuan *Treasury Single Account* untuk meminimalkan *Idle Cash* dapat tercapai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.

3. Pengaruh *Treasury Single Account* terhadap Manajemen Kas dinilai dari *Idle Cash* pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.3 dan 4.4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 *Idle Cash* yang terjadi sebesar Rp822.567.430.804,00 namun pada tahun 2016 penerapan *Treasury Single Account* diketahui *Idle Cash* yang terjadi sebesar Rp0,00. Hal ini di sebabkan karena saldo kas minimal yang berlaku adalah nihil, karena adanya kegiatan Perencanaan Kas yang berlaku dan pelaksanaan *Treasury Single Account* yang mewajibkan uang yang masuk dan keluar setiap harinya melalui satu rekening yaitu Rekening Kas Umum Negara dan mengharuskan bersaldo Rp0,00 setiap harinya.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa *Treasury Single Account* mempunyai pengaruh terhadap Manajemen Kas untuk meminimalkan *Idle Cash* dapat tercapai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta. Dengan berkurangnya *Idle Cash*, uang yang ada dapat

dipergunakan untuk belanja negara dan jika kas yang dimiliki pemerintah belum dipergunakan untuk belanja negara maka kas tersebut dapat digunakan untuk investasi jangka pendek dan dikelola secara profesional sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi negara. Selain hal tersebut, uang yang didapatkan karena berkurangnya *Idle Cash* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas pengeluaran negara secara tepat waktu. Tercapainya hal tersebut memungkinkan Manajemen kas berfungsi secara optimal.